

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di setiap daerah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara optimal. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk pemerataan ekonomi, karena tanpa pembangunan ekonomi pemerataan ekonomi akan sulit untuk dicapai. Secara umum pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang (Hidayat, Lesmana, & Latifah, 2022). Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan tidak hanya terfokus pada peningkatan ekonomi saja, namun juga memperhatikan perbaikan struktur, kelembagaan dan kondisi ekonomi.

Proses pembangunan memiliki beberapa konsekuensi yang ditimbulkan apabila hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu mendongkrak kunci utama penggerak pertumbuhan yaitu masyarakat atau sumber daya manusia (SDM). Hal ini juga sesuai dengan tujuan akhir dari pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sering direfleksikan sebagai perkembangan aktivitas perekonomian daerah namun sering kali pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh beberapa lapisan masyarakat secara tidak merata (Tjahyadi, 2020).

Menurut (Wardhana, 2021), pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk di analisis secara nasional maupun regional. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat

disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan faktor-faktor dalam proses meningkatnya pendapatan riil perkapita pada suatu negara guna melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dilakukan sebuah analisis baik secara nasional maupun regional atau antar daerah.

Dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan suatu asset yang disebut sumber daya baik itu sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu daerah. Namun jika dipertanyakan, mana yang lebih penting diantara kedua sumber daya tersebut maka sumber daya manusialah yang penting. Karena dalam prinsip maupun pelaksanaan dari semua kegiatan ekonomi, faktor manusia itu perlu dijadikan bahan utama yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas keberhasilan pembangunan (Kulla, Rumapea, & Tampongoy, 2018). Peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan mencegah terjadinya masalah ketimpangan pendapatan atau disparitas pendapatan.

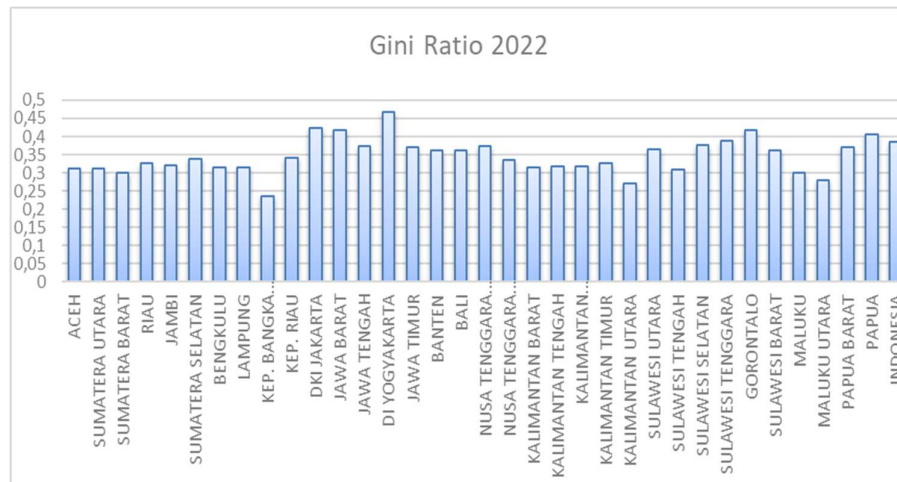
Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada periode tertentu (Dalina, 2022). Sedangkan masalah Disparitas Pendapatan didefinisikan sebagai suatu perbedaan tingkat pendapatan yang terjadi di antara daerah satu dengan daerah lain (Sukma, 2021). Disparitas pendapatan juga diartikan sebagai aspek yang umum terjadi di suatu negara dalam konteks distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, kelompok masyarakat berpendapatan sedang dan kelompok masyarakat

berpendapatan rendah. Oleh karena itu disparitas pendapatan masih sering terjadi, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antar daerah adalah perbedaan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kondisi demografis setiap daerah, dan kondisi sosial budaya.

Indikator disparitas pendapatan dapat dilakukan dengan berbagai pengukuran yang secara umum sering digunakan untuk berbagai penelitian maupun pengetahuan, pengukuran tersebut diantaranya adalah kurva Lorenz dan indeks gini atau ratio gini (Hartanti, Taufiq 2023). Dampak dari disparitas pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah adalah timbulnya kecemburuan sosial antara kelompok yang berpendapatan rendah dengan kelompok yang berpendapatan tinggi. Kecemburuan sosial tersebut akan memperkeruh keadaan karena merasa kurang adanya keadilan. Sehingga hal tersebut beresiko juga akan menimbulkan kriminalitas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Maka dari itu peran pemerintah daerah juga sangat di perlukan. Karena tanpa adanya kebijakan, masyarakat akan semakin terpuruk dan semakin timpang.

Indonesia sampai saat ini belum bisa mengatasi masalah disparitas, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Provinsi D.I Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota yang memiliki pendapatan perkapita yang tidak merata. Berdasarkan data serta publikasi yang diterbitkan BPS diketahui bahwa Provinsi D.I Yogyakarta memiliki angka disparitas pendapatan tertinggi di antara provinsi lain bahkan lebih tinggi dari rata-rata angka disparitas pendapatan di Indonesia.

Gambar 1. 1 Angka Gini Ratio Tiap Provinsi di Indonesia tahun 2022

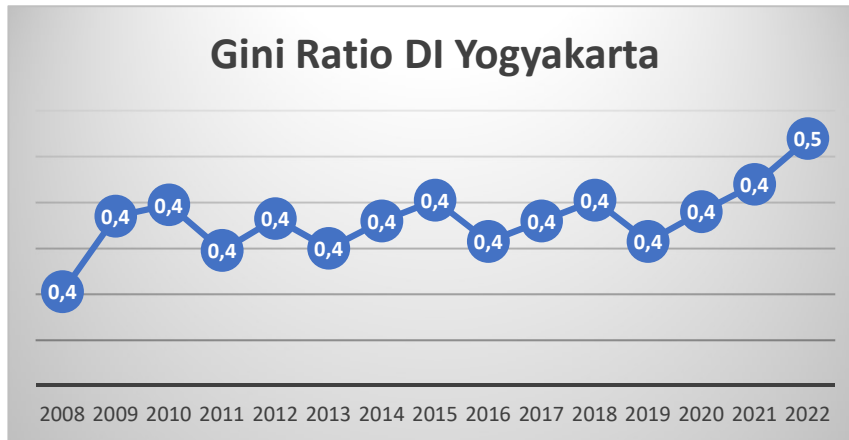


Sumber : BPS Indonesia, diolah,(2022)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dari angka Gini ratio Indonesia tahun 2022 berada di angka 0,38 persen sedangkan Provinsi D.I Yogyakarta berada di angka 0,47 persen. Hal tersebut menandakan Provinsi D.I Yogyakarta masih memiliki angka Disparitas pendapatan yang tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Ratio indeks gini merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kesenjangan pendapatan atau disparitas pendapatan. Gini ratio sendiri adalah ukuran ketimpangan distribusi (Ika Dewi Perwitasa, 2020) Koefisien gini dinyatakan dalam bentuk ratio yang nilainya antara 0 hingga 1. Kategori ketimpangan rendah ketika ratio gini kurang dari 0,4. Kategori ketimpangan sedang ketika nilai ratio gini antara 0,4 hingga 0,5. Kategori ketimpangan tinggi ketika nilai ratio gini sebesar 0,05. Untuk melihat perbandingan angka gini ratio Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2022 di tunjukkan pada grafik 1.2.

Gambar 1. 2 Angka Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008-2022



Sumber : BPS DI Yogyakarta, diolah (2008-2022)

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa angka Gini Ratio Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2008-2022 masih mengalami kenaikan penurunan. Angka terendah berada di tahun 2008 sebesar 0,40 persen tergolong ketimpangan sedang dan Angka tertinggi berada di tahun 2022 yaitu sebesar 0,5 dikategorikan ketimpangan tinggi, hal ini terjadi karena pengeluaran penduduk pada perkotaan maupun pedesaan berada pada kategori ketimpangan tinggi.

Tingginya tingkat disparitas pendapatan dapat dilihat juga dari pendapatan perkapita tertinggi dan pendapatan perkapita terendah di suatu daerah. Pendapatan Perkapita di Provinsi D.I Yogyakarta terendah sebesar Rp.15.000/bulan (gaji abdi dalem 2022). Sedangkan pendapatan perkapita tertinggi sebesar Rp1.840.916/bulan (UMK 2022). Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa selisih antara pendapatan tertinggi dan terendah sangatlah jauh. Hal tersebut yang menyebabkan disparitas pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta selalu meningkat tiap tahunnya.

Jika dilihat berdasarkan data Gini Ratio pada september tahun 2022 ada 10 provinsi dengan ketimpangan pendapatan atau Disparitas pendapatan tertinggi. Dati

urutan paling bawah ada Jawa Tengah dengan angka Gini Ratio 0,37, Sulawesi Barat 0,37, Nusa Tenggara Barat 0,37, Banten 0,38, Papua Barat 0,38, Papua 0,39 , Jawa Barat 0,41, DKI Jakarta 0,41, Gorontalo 0,42 , dan yang ada di urutan paling atas Disparitas tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kusnandar, 2023).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila pertumbuhan ekonomi serta taraf hidup masyarakat meningkat yang dimana hal ini sangat berhubungan dengan indeks pembangunan manusia (Zusanti, Sasana, & Rusmijati, 2020). Besar kecilnya nilai indeks gini akan berdampak secara langsung terhadap produktivitas masyarakat yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima masyarakat. Dengan adanya hal ini kualitas pembangunan manusia dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan berkelanjutan.

Ketimpangan pendapatan terjadi ketika pendapatan yang diterima oleh semua kalangan masyarakat tidak merata dan ditentukan oleh Tingkat pembangunan suatu daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kurang memanfaatkan adanya *property right* pada daerah yang mempunyai potensi sumber daya melimpah dan kurangnya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan distribusi pendapatan telah menjadi persoalan lama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara miskin maupun negara berkembang. Namun, ketimpangan pendapatan juga memungkinkan terjadi di negara maju.

Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) atau Kualitas hidup masyarakat, PBB telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development index (HDI) yang merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia atau bisa dikatakan SDM sejajar dengan IPM. Seperti namanya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap penting karena dapat merefleksikan tingkat pembangunan manusia pada suatu negara. IPM didasarkan pada tiga indeks penilaian yaitu kesehatan, pendidikan dan Pendapatan Perkapita (BPS, 2021a). Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga indikator yaitu 1). Angka harapan hidup, 2). rata-rata lama sekolah dan 3). Kemampuan standar hidup layak. Indikator angka harapan hidup menggambarkan umur panjang dan sehat, rata-rata lama sekolah mencerminkan Tingkat pengetahuan masyarakat. Adapun indikator kemampuan standar hidup layak (Tingkat kemiskinan) digunakan untuk mengukur seberapa layak kehidupan masyarakat (Huda & Indahsari, 2021). Faktor-faktor pembentuk IPM layak dijadikan sebagai tujuan pembangunan karena tidak hanya mencakup pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga berkaitan dengan nilai kualitas pada kondisi manusia. Indeks Pemangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Dapat dilihat pada Gambar berikut

Gambar 1. 3 Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008-2022



Sumber : BPS DI Yogyakarta, diolah (2008-2022)

Pada grafik Indeks Pembangunan di atas dapat di lihat bahwa angka IPM menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya. Konsep Pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ,menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia dengan kategori Sangat Tinggi jika angka IPM > 80, pada tingkat tinggi apabila IPM antara 70-80 , pada tingkat sedang IPM antara 60-70, dan Tingkat rendah IPM berada di angka <60 (Siswati & Hermawati, 2018). Sehingga dapat di simpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi. Faktor-Faktor dalam Indeks Pembangunan manusia dapat di gunakan oleh pemerintah untuk menentukan dan menerapkan kebijakan apa yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Tujuan utama dari pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusan maupun pemerintah daerah (Tufa, 2018).

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, Dimana kemiskinan juga menjadi permasalahan yang sudah lama melekat di Indonesia dan sulit untuk di hilangkan. Dalam indeks pembangunan manusia tingkat kemiskinana berpengaruh terhadap beberapa aspek seperti Pendidikan, Kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat.

Masyarakat miskin memiliki standar hidup layak yang rendah sehingga dari segi pendapatan juga tergolong rendah. Tingkat kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar secara umum yang meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, tempat

tinggal, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, air bersih, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Masdi 2023). Sehingga dalam mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menggunakan faktor utama yaitu Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup layak. Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DETERMINASI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PENENTU TINGKAT DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka untuk mengetahui pengaruhnya terhadap disparitas pendapatan dapat di ketahui beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap tingkat Disparitas Pendapatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh Pendidikan berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah terhadap tingkat Disparitas Pendapatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022?
3. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap tingkat Disparitas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di sebutkan maka dapat dilihat tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap tingkat Dispritas Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022?
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendidikan berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah terhadap tingkat Dispritas Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022?
3. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap tingkat Dispritas Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022?

1.4 Ruang Lingkup

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis time series selama 15 tahun dengan rentang waktu sejak 2008 hingga tahun 2022.
2. Dengan variabel penelitian yang digunakan mencakup variabel bebas yang terdiri dari Angka harapan hidup, Pendidikan, dan Tingkat Kemiskinan, dan Gini ratio sebagai variabel terikat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini jika di sesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan serta informasi mengenai pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengurangi angka disapritas pendapatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berguna untuk menentukan, memperkirakan, dan menyusun suatu kebijakan untuk mengatasi masalah disparitas pendapatan yang masih mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga pemerintah dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah.

b. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan konseptual dan referensi bagi pihak lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai Angka harapan hidup, Pendidikan, Tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan sesuai dengan fenomena baru yang mungkin terjadi di masa mendatang.